

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu

Rebecca Vivi Arriany¹, Imam Nazarudin Latif², Umi Kulsum³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : rebeccaviviarrriany27@gmail.com

Keywords :

financial statement presentation, balance sheet, cash flow statement, Government Accounting Standards, SAP No. 01 of 2010 and SAP No. 03 of 2010.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the financial statements of BPKAD Mahulu Regency on the application of the balance sheet with SAP No. 01 of 2010 concerning the presentation of financial statements, and to find out and analyze BPKAD financial statements on the application of cash flow statements with SAP No. 01 of 2010 concerning the presentation of financial statements and with SAP No. 03 of 2010 concerning the presentation of cash flow statements.

The analytical tool used is a comparative analysis that compares the presentation of balance sheet and cash flow statements against SAP in 2010, and was tested using the J.Champion formula.

The results of this study are the presentation of the 2017-2016 balance sheet in accordance with SAP No. 01 of 2010, and the presentation of cash flow statements for 2017-2016 in accordance with SAP No. 01 and SAP No. 03 of 2010.

PENDAHULUAN

Tahun 2015 seluruh instansi pemerintah Indonesia memasuki babak baru dengan menerapkan standar akuntansi berbasis akrual penuh. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1).

Fenomena yang terjadi saat ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu pada penyajian laporan keuangan, misalnya dalam konsep penyusunan informasi yang relevan dan andal meliputi : ketepatan waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan penyajian wajar, masih mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Menurut hasil wawancara pada tahun 2015 penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan pegakuan *disclaimer*. Tahun 2016 dan 2017 penyajian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan pegakuan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Harapan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu agar ditahun 2019 dan seterusnya, hasil opini auditor dalam penyajian laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akibatnya, penyajian laporan keuangan pada BPKAD Mahakam Ulu telah berjalan dengan sebagai mana mestinya sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yovenalis A'ai (2016) dalam penelitian "Audit Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Barat". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian pengelolaan keuangan negara yang diterapkan di Kutai Barat apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa penyajian dan pelaporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat

disajikan sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Akibatnya, penyajian laporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat telah berjalan dengan sebagai mana mestinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi sektor publik menurut Wiratna (2015:1) adalah “Aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dan publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya”.

Standar akuntansi pemerintahan atau SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 Tahun 2010 (2018:57) Tujuan Pernyataan Standar ini adalah “Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan cara membandingkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan dengan penyajian laporan keuangan pada neraca dan laporan arus kas tahun 2016-2017 pada BPKAD Kabupaten Mahulu. Alat ukur yang digunakan adalah menggunakan rumus Dean J. Champion. Menurut Dean J. Champion, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{jumlah jawaban "Ada"}}{\sum \text{jumlah poin pertanyaan}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna untuk pengambilan simpulan, seperti yang telah dikemukakan dalam buku *Basic Statistic For Social Research*.

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Penyajian Laporan Keuangan (Ukurannya)

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan tidak sesuai
26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai
51% - 75%	Dikategorikan cukup sesuai
76% - 100%	Dikategorikan sesuai

Sumber: Dean J. Champion, 1990

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Checklist Penyajian Laporan Keuangan Neraca Pada BPKAD Kab. Mahulu Terhadap SAP No. 01 Tahun 2010

Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai	N/A
Klasifikasi Neraca			
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu	✓		
Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.		✓	
Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:			
1. Kas dan setara	✓		
2. Investasi jangka pendek	✓		
3. Piutang pajak dan bukan pajak	✓		
4. Persediaan	✓		
5. Investasi jangka panjang	✓		
6. Aset tetap	✓		
7. Kewajiban jangka pendek	✓		
8. Kewajiban jangka panjang	✓		
9. Ekuitas	✓		
Pertimbangan disajikan pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:			
a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset			✓
b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan			✓
c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.			✓
Aset Lancar			
Aset lancar meliputi:			
a. kas dan setara kas	✓		
b. investasi jangka pendek, pos-posnya antara lain:	✓		
1. deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan		✓	
2. surat berharga yang mudah diperjual belikan		✓	
c. Piutang, pos-posnya antara lain:	✓		
1. Piutang pajak			✓
2. Retribusi			✓
3. Denda			✓
4. Penjualan angsuran			✓
5. Tuntutan ganti rugi			✓
6. Piutang lainnya	✓		

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 2 Checklist Penyajian Laporan Keuangan Neraca Pada BPKAD Kab. Mahulu Terhadap SAP No. 01 Tahun 2010

Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai	N/A
Aset Nonlancar			
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.	✓		
Investasi nonpermanen terdiri dari:			
a. Investasi dalam Surat Utang Negara			✓
b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga	✓		
c. Investasi nonpermanen lainnya.	✓		
Investasi permanen terdiri dari:			
a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara	✓		
b. Investasi permanen lainnya.	✓		
Aset tetap terdiri dari:			
a. Tanah	✓		
b. Peralatan dan mesin	✓		
c. Gedung dan bangunan	✓		
d. Jalan, irigasi, dan jaringan	✓		
e. Aset tetap lainnya	✓		
f. Krontruksi dalam pengerjaan.	✓		
Pengakuan Aset			
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	✓		
Aset diakui pada saat diterima atas kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.	✓		
Pengukuran Aset			
Pengukuran aset adalah sebagai berikut:			
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal	✓		
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan	✓		
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal	✓		
d. Persediaan dicatat sebesar	✓		
1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian	✓		
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri	✓		
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi/rampasan.	✓		
Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tangan bank sentral pada tanggal neraca.			✓
Dilanjutkan			

Lanjutan Tabel 2 Checklist Penyajian Laporan Keuangan Neraca Pada BPKAD Kab. Mahulu Terhadap SAP No. 01 Tahun 2010

Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai	N/A
Kewajiban Jangka Panjang			
Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan itu jika:			
a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan	✓		
b. Entitas bermaksud menandai kembali (<i>refinance</i>) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang	✓		
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (<i>refinancing</i>), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	✓		
Ekuitas			
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.	✓		
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.	✓		
Informasi yang disajikan dalam neraca			
Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:			
a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya		✓	
b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan		✓	
c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap	✓		
d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;			✓
e. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya			✓
f. Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.	✓		

Sumber: Data diolah, 2019

Berikut pengujian *J. Champion* pada penyajian Neraca BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 yang sudah dianalisis tersebut. Jumlah poin *checklist* penyajian neraca sebanyak 87, dengan jawaban telah sesuai sebanyak 68 *point*, jumlah jawaban tidak sesuai sebanyak 4 *point*, dan jumlah jawaban N/A sebanyak 15 *point*, maka pengujian *J.Champion* adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentasi} = \frac{\sum \text{jumlah jawaban "Ada"}}{\sum \text{jumlah poin pertanyaan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentasi} = \frac{68}{87} \times 100\%$$

$$\text{Persentasi} = 78\%$$

Nilai persentasi kesesuaian penyajian neraca BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar 78%, pada indikator *J.Champion* nilai 76% - 100% dikategorikan sesuai. Maka penyajian neraca BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 telah sesuai dengan SAP No. 01 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Tabel 3 Checklist Penyajian Laporan Keuangan Arus Kas Pada BPKAD Kab. Mahulu Terhadap SAP No. 01 dan SAP No. 03 Tahun 2010

Keterangan	Sesuai	Tidak Sesuai	N/A
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.	✓		
Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, yaitu:	✓		
1. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.			✓
2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan kedalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan kedalam aktivitas investasi.			✓

Sumber: SAP No. 01 Tahun 2010 dan SAP No. 03 Tahun 2010

Berikut pengujian *J. Champion* pada penyajian Laporan Arus Kas BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 yang sudah dianalisis tersebut. Jumlah pernyataan sebanyak 9 poin, jumlah pernyataan sesuai sebanyak 7 poin, dan jumlah pernyataan N/A sebanyak 2 poin, maka pengujian *J.Champion* adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentasi} = \frac{\sum \text{jumlah jawaban "Ada"}}{\sum \text{jumlah poin pertanyaan}} \times 100\%$$

$$\text{Persentasi} = \frac{7}{9} \times 100\%$$

$$\text{Persentasi} = 77,8\%$$

Nilai persentasi kesesuaian penyajian laporan arus kas BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar 77,8%, pada indikator *J.Champion* nilai 76% - 100% dikategorikan sesuai. Maka penyajian laporan arus kas BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 telah sesuai dengan SAP No. 01 dan SAP No. 03 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Tentang Penyajian Laporan Arus Kas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan:

1. Penyajian laporan Neraca BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 telah sesuai dengan SAP No. 01 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Penyajian Laporan Arus Kas BPKAD Mahulu Tahun 2017 dan 2016 telah sesuai dengan SAP No. 01 dan SAP No. 03 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Arus Kas.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, setelah di analisis dan dibahas dalam skripsi ini, ada beberapa saran bagi BKPAD Mahulu, untuk menjadi sarana perbaikan kedepannya, antara lain:

1. Penyajian neraca dan laporn arus kas BPKAD Mahulu sepenuhnya sudah menerapkan SAP No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan dan SAP No. 03 Tahun 2010 Tentang laporan arus kas, hanya ada beberapa akun pada neraca yang tidak sesuai dengan SAP No. 01, seperti investasi jangka pendek yang penggolongannya tidak diklasifikasikan sesuai dengan SAP No. 01, dan ada beberapa pernyataan pada SAP No. 01 dan SAP No. 03 yang N/A pada penyajian laporan neraca ataupun laporan arus kas. Sebaiknya, pos-pos akun yang tidak ada tersebut, diharapkan untuk diberikan keterangan mengapa pos-pos akun tersebut tidak digunakan, dan keterangan tersebut dicatat pada Catatan Atas Lpaoran Keuangan (CALK). Agar laporan neraca dan arus kas terlihat sebagaimana mestinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan dalam laporan auditnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menggunakan variabel lain selain variabel yang digunakan pada penelitian ini, contohnya Laporan Operasional, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan lain sebagainya.

REFERENCES

- Champion, Dean J. 1990. *Basi Statistic For Socian Research*. Edition 1, New York: Mac Media.
- Fauziah, Ifat. 2018. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Latif, Imam Nazarudin. 2017. *Audit dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Barat*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.